

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

LAPORAN PROGRAM KERJA

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE JANUARI S.D MARET 2024

Mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi Jawa Tengah, TPID Provinsi Jawa Tengah menyusun program kerja yang merupakan strategi pengendalian inflasi yang disebut dengan **Pandawa Lima (Pengendalian dan Pengawasan Harga Melalui 5 Langkah)**, yang terdiri dari:

1. Pemenuhan ketersediaan pasokan;
2. Pembentukan harga yang terjangkau;
3. Pendistribusian pasokan aman dan lancar;
4. Perluasan akses informasi; dan
5. Penerapan Protokol Manajemen Lonjakan Harga (PMLH).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melakukan pengendalian inflasi di Jawa Tengah kami telah melakukan beberapa kegiatan yakni:

1. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)
2. Perluasan Kios TPID
3. Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak
4. Sidak Pasar Menjelang HBKN Ramadan
5. Pelaksanaan Rapat TPID Mingguan
6. *High Level Meeting* TPID Semester I 2024

A. Perkembangan Inflasi Gabungan Enam Kota di Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2024

Inflasi gabungan kota di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2024 sebesar 3,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (2,89%; yoy). Inflasi gabungan kota di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan nasional (3,05%; yoy) dan wilayah Jawa (2,96%; yoy). Perkembangan yang sama juga berlangsung pada seluruh provinsi di kawasan Jawa, dengan realisasi inflasi terendah dicatatkan oleh gabungan kota di Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 2,18% (yoy), sementara inflasi tertinggi berlangsung pada gabungan kota di Provinsi Jawa Barat (3,48%; yoy). Peningkatan tekanan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh tekanan inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat pada momentum festive season Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.

| APRIL 2024 | | MEI 2024 | | JUNI 2024 | |
|---------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Komoditas | Andil | Komoditas | Andil | Komoditas | Andil |
| Bawang Merah | 0.20% | Cabai Merah | 0.04% | Cabai Rawit | 0.03% |
| Emas Perhiasan | 0.07% | Telur Ayam Ras | 0.04% | Sigaret Kretek Mesin (SKM) | 0.01% |
| Angkutan Antar Kota | 0.04% | Bawang Merah | 0.03% | Kentang | 0.01% |
| Bawang Putih | 0.03% | Emas Perhiasan | 0.03% | Tarif Kereta Api | 0.01% |
| Minyak Goreng | 0.02% | Sigaret Kretek Mesin (SKM) | 0.02% | Mobil | 0.01% |

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

| APRIL 2024 | | MEI 2024 | | JUNI 2024 | |
|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------|
| Komoditas | Andil | Komoditas | Andil | Komoditas | Andil |
| Beras | -0.19% | Beras | -0.13% | Bawang Merah | -0.15% |
| Telur Ayam Ras | -0.12% | Daging Ayam Ras | -0.07% | Daging Ayam Ras | -0.06% |
| Cabai Merah | -0.07% | Tomat | -0.04% | Telur Ayam Ras | -0.04% |
| Cabai Rawit | -0.06% | Angkutan Antar Kota | -0.04% | Tomat | -0.03% |
| Buncis | -0.02% | Cabai Rawit | -0.03% | Bawang Putih | -0.03% |

Tabel 2 Tabel Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Di tahun 2024, terdapat penambahan kota penghitungan inflasi baru di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan informasi BPS, terdapat perubahan tahun dasar dalam metode penghitungan inflasi serta penambahan wilayah yang dihitung sebagai kabupaten/kota penghitungan inflasi. Seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat maka sejak Januari 2024 pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2022=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2022=100) dibandingkan (IHK 2018=100) terutama mencakup penambahan wilayah, penambahan pasar online, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Adapun penambahan penghitungan kota IHK di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Rembang.

Sebagian besar kota pantauan inflasi di Jawa Tengah pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan inflasi dibandingkan periode sebelumnya. Inflasi tertinggi pada periode laporan berlangsung di Kab. Rembang yang mencapai 5,38% (yoy). Adapun inflasi terendah berlangsung di Kota Semarang yang tercatat sebesar 2,89% (yoy). Di sisi lain, Kota Surakarta justru mencatatkan penurunan inflasi pada periode laporan.

Tabel 3 Tabel Inflasi Tahunan Kota Jawa Tengah

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

*Menggunakan SBH 2022 (2022=100)

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

B. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Jawa Tengah

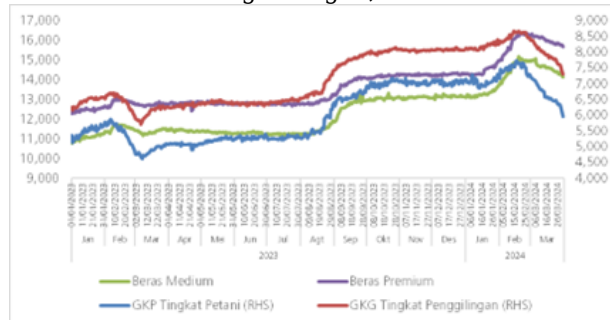
Peningkatan tekanan inflasi tahunan gabungan kota di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2024 terutama didorong oleh kenaikan inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Dari Subkelompok Makanan, peningkatan tekanan inflasi salah satunya didorong oleh kenaikan demand masyarakat yang sejalan dengan momentum hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.

Kenaikan harga beras dipengaruhi oleh periode tanam yang sedang berlangsung serta anomali cuaca yang berlangsung sejak awal tahun 2024. Sesuai dengan pola musimannya, triwulan I merupakan masa tanam untuk komoditas padi di Jawa Tengah sehingga belum terdapat tambahan pasokan. Di sisi lain, di awal tahun 2024, sejumlah daerah di Jawa Tengah mulai memasuki musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut mengakibatkan dua kabupaten di Jawa Tengah dilanda bencana banjir, yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Di tengah penurunan produksi beras, konsumsi masyarakat meningkat sejalan dengan periode festive season Ramadan dan Idul Fitri 1445 H sehingga berdampak pada kenaikan harga beras yang lebih tinggi.

| Kota | Inflasi 2023 (% yoy) | Inflasi 2023 (% yoy) | Inflasi Tw I 2024 (% yoy) | Inflasi Tw I 2024 (% yoy) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cilacap | 3.22 | 2.77 | 2.69 | 3.10 |
| Kendaraan | 3.25 | 3.69 | 3.11 | 2.95 |
| Seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih. Harga daging ayam ras dan telur ayam ras mengalami kenaikan seiring dengan harga pakan ternak yang meningkat. | 5.15 | 3.47 | 3.47 | 4.16 |
| Peningkatan harga lebih lanjut juga berlangsung seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat yang sejalan dengan momentum Ramadan dan Idul Fitri 1445 H. Selanjutnya, komoditas bawang putih turut mengalami kenaikan harga seiring dengan kenaikan harga | 5.11 | 2.88 | 5.09 | 3.18 |
| Semarang | 2.95 | 2.31 | 2.54 | 2.89 |
| Tegal | 3.56 | 3.06 | 3.28 | 3.41 |

bawang putih di negara asal impor, yaitu Tiongkok. Secara rata-rata, harga bawang putih pada Maret 2024 telah mencapai US\$1,5/kg atau setara dengan Rp 23.000/kg. Sementara pada Maret 2023 lalu harga bawang putih di Tiongkok di bawah US\$1/kg. Penyebab kenaikan harga bawang putih lainnya yaitu realisasi impor bawang putih yang relatif masih rendah. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Persetujuan Impor (PI) sebanyak 214.194 ton di tahun 2024 ini. Adapun realisasi impor bawang putih baru mencapai 50.721 ton.

Sumber: Panel Harga Pangan, diolah



Grafik 1 Perkembangan Harga Beras di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Panel Harga Pangan, diolah
Grafik 2 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Panel Harga Pangan, diolah
Grafik 3 Perkembangan Harga Telur Ayam Ras di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Panel Harga Pangan, diolah
Grafik 4 Perkembangan Harga Bawang Putih di Provinsi Jawa Tengah

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Jawa Tengah

1. **Dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan strategis, TPID Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pada Januari 2024, yaitu:**
2. *Focus Group Discussion* (FGD) Penambahan Kota IHK di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan Pemprov Jawa Tengah, Pemda Kab. Wonosobo, Pemda Kab. Wonogiri, Pemda Kab. Rembang dan KPw BI Solo.
3. Melakukan Audiensi bersama dengan BPS, BI dan OJK dalam upaya pengendalian inflasi khususnya di kota IHK baru.
4. Melakukan Asistensi dengan Bupati Wonosobo, Wonogiri dan Rembang terhadap percepatan upaya pengendalian inflasi daerah bersama BPS.
5. Rapat Koordinasi dalam rangka Sinkronisasi Kegiatan Pengendalian Inflasi bersama

TPID Provinsi Jawa Tengah.

6. Pemberian Bantuan Hibah Mobil untuk Fasilitas Distribusi Pangan kepada Pemerintah Kota Semarang.
7. Bersinergi dengan BUMD Pangan Jateng dalam operasi KENDIL JATENG secara *mobile* (Kendaraan Inflasi Jateng) sebagai intervensi harga pada kota/kab IPH tertinggi mingguan sebagaimana rilis BPS pada Rakor Mingguan Kemendagri.
8. Mengoptimalkan penyaluran SPHP dan CBPD dalam upaya intervensi pada wilayah kab/kota yang memiliki harga beras tinggi/ andil penyumbang beras pada inflasi.
9. Sebagai bagian dari upaya keterjangkauan harga dan menjaga ketersediaan pasokan, dilakukan perluasan Kios Bersama TPID ke beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui SE PJ Gubernur Jawa Tengah No.500/0001173 tanggal 31 Januari 2024 tentang Pendirian Kios Bersama TPID Pada Kabupaten/Kota Yang Menjadi Objek Perhitungan Indeks Harga Konsumen di Jawa Tengah.
10. **Kegiatan TPID Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada Februari 2024, yaitu:**
11. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) se-Jawa bertempat di Malang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bank Indonesia, Dinas Pertanian, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Jawa.
12. TPID Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 79 kali.
13. **Kegiatan TPID Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan s.d Maret 2024, yaitu:**
14. Guna persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, TPID Gencar melaksanakan GPM hingga 160 kali yang ditujukan kepada masyarakat terdampak inflasi dan/atau masyarakat miskin pada 35 kab/kota (daerah IPH tertinggi mingguan atau daerah miskin ekstrim)
15. Pelaksanaan GPM serentak
 - pertama dilaksanakan pada 8 Maret 2024 di 5 (lima) wilayah, yaitu Kota Semarang, Surakarta, Kabupaten Batang, Cilacap, dan Banyumas. Dalam kegiatan GPM tersebut, telah disalurkan total sebanyak 24 ton beras, baik beras SPHP maupun beras komersil.
 - kedua dilaksanakan pada 15 Maret 2024 di 5 (lima) wilayah, yaitu Kota Semarang, Tegal, Surakarta dan Kabupaten Cilacap serta Banyumas. Dalam kegiatan tersebut, disalurkan total sebanyak 33 ton beras, baik beras SPHP maupun beras komersil. Selain itu, juga dialurkan beberapa komoditas strategis dengan harga terjangkau, antara lain: 1) 112 kg cabai merah, 2) 1,8ton telur ayam ras, 3) 6,2 ton gula pasir, dan 4) 2.940 liter minyak goreng.
1. Penyaluran subsidi harga pangan di tingkat konsumen yang diprakarsai oleh Pemprov Jateng melalui Dishanpan. Komoditas yang disubsidi adalah beras medium, gula pasir, dan telur ayam ras. Penyaluran subsidi sebanyak 90 ton beras, 18 ton gula pasir, dan 9 ton telur ayam ras di sembilan kabupaten/kota yang merupakan titik pantuan inflasi.
2. Penyaluran subsidi harga pangan kepada 300 mitra kios untuk komoditas beras dan telur setiap bulannya total realisasi s.d maret sebesar Rp. 400.000.000,- dari target keseluruhan 1M;
3. *High Level Meeting* (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Provinsi Jawa Tengah pada 6 Maret 2024

HLM tersebut dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah dan dihadiri oleh Kepala Daerah 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah atau yang mewakili, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik, BULOG, Pertamina, dan BUMD.

Terdapat tiga rekomendasi sebagai berikut:

- Mempercepat implementasi penguatan produktivitas pangan strategis, penguatan ekosistem BUMD dan BUMD serta penguatan dan perluasan kios pengendalian inflasi.
 - Melakukan kolaborasi dalam rangka menjaga stabilisasi harga beras melalui percepatan penyaluran SPHP, bansos, intensifikasi pelaksanaan OP dan GPM, serta pengalihan CBP kepada komersil.
 - Mengatur waktu agar kenaikan harga atau tarif komoditas yang diatur oleh pemerintah daerah, dilakukan pada saat tekanan inflasi rendah atau dilakukan secara bertahap.
1. *Capacity Building* TPID Provinsi Jawa Tengah pada 7 Maret 2024 dengan tema “Penguatan Komitmen Daerah terhadap Kualitas Data Input SP2KP sebagai Proxy Inflasi Jawa Tengah”. Kegiatan tersebut turut mengundang petugas inputing data SP2KP di 35 kab/kota di Jawa Tengah. Adapun pemateri dari kegiatan tersebut yaitu BPS Provinsi Jawa Tengah.
 2. Pelaksanaan rapat mingguan TPID.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Jawa Tengah

Tekanan inflasi Gabungan kota IHK di Provinsi Jawa Tengah mereda. Pada April 2024, gabungan sembilan kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode laporan mencatatkan inflasi sebesar 0,20% (mtm), menurun dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,60% (mtm). Realisasi inflasi tersebut berada di bawah nasional yang sebesar 0,25%. Dengan demikian, secara tahunan inflasi gabungan kota di Jawa Tengah sebesar 3,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

Berdasarkan kelompok komoditas, penurunan tekanan inflasi terutama bersumber dari penurunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok tersebut mengalami deflasi seiring dengan harga sejumlah komoditas pangan yang menurun serta panen raya yang mulai berlangsung di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Di sisi lain, inflasi yang terjadi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta Kelompok Transportasi menahan penurunan inflasi lebih lanjut.

Untuk keseluruhan tahun 2024, inflasi IHK diperkirakan akan berada pada sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$. Untuk menjaga inflasi kembali berada pada rentang target, Bank Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah, dengan menyusun berbagai program pengendalian inflasi. Program pengendalian inflasi tersebut diarahkan kepada pengelolaan ekspektasi masyarakat yang selanjutnya menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah proses pemulihan perekonomian.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Jawa Tengah

- Untuk menjaga kecukupan pasokan antar daerah dan antar waktu, perlu dilakukan penyesuaian pola tanam dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (intra Jawa Tengah maupun antar wilayah Jawa Tengah).

- Perlu penguatan peran BUMD dan BUMP sebagai *oftaker* pangan di Jawa Tengah.
- Perluasan kios TPID sebagai *market reference* komoditas pangan.
 - Sinergi pengendalian inflasi daerah dengan TPID dan K/L terkait terus dilanjutkan. Selain itu, perlu adanya dukungan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui beberapa program utama, antara lain: Kerjasama Antar Daerah (KAD), Subsidi Ongkos Angkut, Operasi Pasar Murah, Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, Penyaluran Bantuan Alsintan dan Saprotan, Digitalisasi Data dan Informasi, serta Koordinasi dan Komunikasi melalui *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).